



PERSETUJUAN

Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Terhadap Partisipasi Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bulu Tahun 2020 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal

Telah disetujui oleh

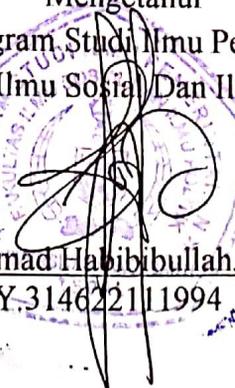
Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2


Arif Zainudin, S.IP., MA
NIPY.20964101988


Agus Setio Widodo, S.IP., M.SI
NIPY. 16952681974

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Akhmad Habibullah, M.IP
NIPY.314622111994



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
ILMU KOMUNIKASI (Terakreditasi Baik)
Jl. Haalmahera KM. 1, Telp. (0283)323290, Tegal

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2020 DI DESA BULU
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

Telah dipertahankan dalam sidang skripsi oleh Panitia Ujian Skripsi Program
Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal

Hari : Senin

Tanggal : 29 Juli 2024

1. Ketua Dewan Penguji : Dra. Erny Rosyanti, M.Si
NIP. 3852391959 
2. Anggota Dewan Penguji : Arif Zainudin, S.IP. M.IP
NIPY. 20964101988 
3. Anggota Dewan Penguji : Agus Setio Widodo, S.IP.M.Si(
NIP.14251921973 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Onggul Sugiharto, S.IP. M.Si.
NIPY. 1425192197
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nada Nita Viani

NPM : 2118500041

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Terhadap Partisipasi Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 Di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang”** adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bahwa saya akan bertanggung jawab atas SKRIPSI ini secara keseluruhan jika dikemudian hari ditemukan plagiat atau menyalin hasil penelitian dari orang lain dengan tingkat kemiripan 90%, dan jika muncul masalah terkait penelitian yang telah dilakukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dan penuh kesadaran.

Tegal, 29 Juli 2024



Nada Nita Viani
NPM.2118500041



**Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Terhadap Partisipasi Politik
Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 Di Desa
Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh :
NADA NITA VIANI
NIM. 2118500041

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang sistem pemerintahannya berdasarkan demokrasi, artinya pemerintahan dibentuk oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, untuk memenuhi keinginan rakyat. Dalam kerangka demokrasi Pancasila, asas kedaulatan menentukan cara untuk memperoleh sistem demokrasi kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum, di mana rakyat berpartisipasi aktif dalam memilih wakil-wakilnya, baik langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik itu adalah elemen penting dari struktur negara demokratis. Hal ini juga merupakan ciri modernisasi politik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah di masa depan.

Partisipasi politik dijamin oleh negara dan partisipasi yaitu proses aktif inisiatif masyarakat di dalam suatu kegiatan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berorganisasi dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan, dan lain-lain, ditentukan dengan undang-undang”, dan diatur dengan undang-undang n. , yang mencantumkan hak-hak yang harus dilindungi negara sehubungan dengan hak berpendapat, hak berserikat, hak-hak untuk memilih dan dipilih, persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas keadilan.

Sebagai negara berkembang yang aktif, hal ini terlihat dari cara pemerintah Indonesia saat ini mengembangkan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan di semua bidang kehidupan, mulai dari negara bagian hingga negara-negara bikini.

Salah satu aspek yang disebutkan dalam teks tersebut adalah “Pembangunan Politik” yang memiliki beberapa kategori. Salah satu strateginya adalah mendorong partai politik untuk mendukung tujuan bersama, mendukung supremasi hukum, dan menjadi anggota kelompok atau koalisi yang mempunyai kepentingan bersama, membuat saluran komunikasi atau bentuk interaksi lainnya dengan anggota parlemen atau lembaga pemerintah lainnya, dan sebagainya. (Miriam Budiarjo, 1998: 1-2).

Selain partisipasi politik aktif, terdapat juga bentuk partisipasi politik yang pasif atau apatis. Empat unsur realisme politik adalah alienasi, anomie, dosa, dan apatis. Secara umum keempat unsur tersebut diartikan sebagai suatu jenis kegiatan yang tidak selalu melibatkan perhatian bersama dengan orang lain di lingkungan sekitar (Michael Ruff dan Phillip Althoff, 2003: 143).

Perbedaan individu dalam TKP disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain jenis kelamin, jenis pendidikan, status sosial ekonomi, dan pengalaman kerja. Misalnya saja di negara berkembang seperti Indonesia, partisipasi politik merupakan permasalahan yang sulit dan membutuhkan waktu untuk dipahami dan diselesaikan melalui proses kepemilikan negara atau pembangunan negara. Menurut Moeljarto Tjokowinarto, masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan, status sosial, dan ekonomi, dan kebutuhan yang semakin mendesak, seperti legitimasi politik; Tingkat kesadaran ini ditentukan oleh kualitas fungsi politik berbagai organisasi politik (Moeljarto Tjokrowinarto, 2004: 240-241). Temuan ini kemudian diterapkan pada sejarah Amerika Serikat dalam penelitian Sidney Verba dan Norman H. Nie, yang dianalisis lagi oleh Karl Deusch dalam *Politics and Government* dan mengemukakan gagasan bahwa “Amerika terbagi menjadi tiga kelompok.

Hasil penelitian Hetti SN Simanjuntak yang dikemukakan oleh Tony Situmorang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik individu atau kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya relatif tinggi, namun perhatian terhadap partisipasi politik lebih rendah (Hetti SN Simanjuntak, 2007:62).

Pendidikan merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk memperluas wawasan masyarakat secara umum, khususnya dalam rangka peningkatan pengetahuan teoritis dan kemampuan berpikir kritis yang menunjang upaya mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pendidikan dasar dapat memberikan pengetahuan tentang permasalahan politik dan skandal politik, serta mengembangkan pemikiran kritis dan kecerdasan politik.

Orang yang mempelajari lebih dalam mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kebijakan pemerintah, lebih memperhatikan kehidupan politik, menyerap lebih banyak informasi tentang proses politik dan mempunyai pengetahuan lebih banyak di bidangnya. Mas'oed, Moctar (2001: 49). Pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan, pembangunan ekonomi, stabilitas politik, ideologi dan kebersihan diri meningkatkan kapasitas penduduk dalam memenuhi kebutuhannya baik secara kualitas maupun kuantitas. Masyarakat menjadi semakin kritis terhadap setiap perkataan, gerak tubuh, ide dan pendapat yang berpartisipasi aktif di dalamnya. Hal ini sungguh membingungkan karena pernyataan ini hanya menunjukkan betapa umum orang-orang yang bernegara dan berkebangsaan dalam masyarakat.

Hasil observasi awal di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang di dapati data keadaan pendidikan masyarakat. Jumlah penduduk Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ;

Tabel 1.1

Tingkat Pendidikan Formal masyarakat desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang 2020.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belm Sekolah	1.382 jiwa
2.	SD/Sederjat	3.180 jiwa
3.	SMP/Sedrajat	730 jiwa
4.	SMA/Sederajat	475 jiwa
5.	Perguruan Tinggi	112 jiwa
6.	Putus Sekolah	75 jiwa
7.	Buta Aksara	200 jiwa

Sumber : Data Pokok desa Bulu/Kelurahan Petarukan tahun 2020

Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak melibatkan 12 kecamatan yang terdiri dari 28 desa di wilayah Kabupaten Pemalang, termasuk Minggu (27 Desember 2020). Bupati Pemalang, H. Junaedi, SH. MM dalam menyelenggarakan pemilihan kepala negara berharap pemilihan kepala negara dapat dijadikan sebagai momentum untuk lebih memperkuat partisipasi masyarakat dalam konsolidasi demokrasi, dimana masyarakat mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. negara ini untuk masa depan. 6 tahun .(<http://www.pemalangkab.go.id/>).

Namun menurut keterangan tersebut, partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala negara hanya sebatas ikut serta dalam kampanye pemilihan kepala negara dengan harapan memperoleh manfaat berupa uang, tanah, atau bahkan gratis. bekerja dan berpartisipasi dalam pertemuan publik. Jelas bahwa masyarakat yang tinggal di sana tidak mengkritik hukum, adat istiadat, tradisi atau hukum alam apapun dan tidak berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI DALAM PELAKSANAAN PILKADES TAHUN 2020 DI DESA BULU KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG”.

1.1. Rumusan Masalah

Cara demokratis adalah pemilihan kepala negara yang melibatkan masyarakat desa, yang memberikan sarana untuk memilih kepala negara yang tidak memihak dan mampu membangun negara. Oleh karena itu, pengangkatan kepala negara sangatlah penting karena sangat menghambat kemampuan pemerintahan negara untuk berkembang. Kepala negara dikenal sebagai kepala negara atau pejabat tertinggi dalam pemerintahan negara tersebut.

Orang yang tidak mengkritik apapun dalam masyarakat, termasuk agama, politik, tindakan dan pemikiran, serta ikut serta dalam pemilihan kepala negara. Salah satu kontribusi yang paling penting adalah kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga akhir proyek, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dan melaksanakan proyek.

Peran kelompok pertempuran dalam partisipasi khusus ini dapat dianggap kurang penting tentunya pada saat itu (Gatara & Dzulkiah Said, 2007: 90-91).

Berdasarkan latar belakang seperti diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pendidikan formal masyarakat desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat di desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ?
3. Apakah tingkat pendidikan formal dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ?

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - Mengidentifikasi tingkat pendidikan masyarakat desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang,
 - Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang,
 - Menganalisis hubungan/pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pembahasan teori mengenai perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, penulis berharap dapat memberikan wawasan dan penjelasan tentang tingkat pendidikan dalam kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat umum khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa terutama yang terdaftar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pemerintahan.

b) Manfaat secara praktis

- Bagi masyarakat, perluas pengetahuannya untuk meningkatkan kesadarannya dengan menyalurkan partisipasinya melalui kegiatan pemilihan kepala desa.
- Untuk ilmu pengetahuan, sebagai pelengkap ilmu pengetahuan dan sebagai pelengkap literatur dalam penelitian sejenis.
- Bagi mahasiswa, mempraktekkan teori-teori yang diperoleh di bangku SMA, yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian relevan yang menjadi landasan penelitian, peneliti menemukan publikasi yang mengangkat topik yang diangkat dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini :

Tabel 2.1

Referensi Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rina Rahman Olii Asep Mahpudz& Imran	PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KELURAHAN TATURA UTARA KECAMATAN PALU SELATAN PADA PILKADA KOTA PALU TAHUN 2015	Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pendidikan terhadap partisipasi politik pada pemilukada kota Palu diperoleh tabel r hitung $(0,948) > r (0,235)$ sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. yang berarti dalam hal ini tingkat pendidikan (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik (Y). Berdasarkan hasil perhitungan, besarnya kontribusi tingkat

			<p>pendidikan terhadap partisipasi politik sebesar 0,89 termasuk dalam kategori korelasi tinggi, perhitungan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesadaran politik.</p>
2.	Lidya	<p>PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DESA KECAMATAN SINGKIL UTARA (Studi Kasus Desa Gosong Telaga Timur, Ketapang Indah, Kampung Baru)</p>	<p>Pendidikan di Kabupaten Singkil Utara Provinsi Aceh Singkil berada pada kategori rendah. Namun partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa secara langsung sangat tinggi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap partisipasi. 2. Tingkat seleksi kepala desa di Distrik Shinkil Utara sangat tinggi meskipun latar belakang pendidikannya rendah. 3. Budaya partisipatif dalam masyarakat komunitarian dan budaya politik kaula cenderung muncul karena</p>

			masyarakat bosan dengan proses pemilu dan menjadi teralihkan serta apatis karena kurangnya kandidat.
3.	Hamdi Naufal Mahbub, Heryono Susilo Utomo , Budiman	PENGARUH SOSIALISASI POLITIK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA MENDIK KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015	Untuk variabel-variabel dalam penelitian ini, beberapa variabel mempunyai parameter sebagai alat ukur yang menyusun isi kuesioner. Untuk indikator sosialisasi politik yaitu peniruan, pengajaran dan motivasi, jumlah tanggapan terbanyak berada pada kategori sedang sebesar 37,5%. Hal ini juga menjadi jawaban jika masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser yang meliputi peniruan, edukasi serta motivasi sudah cukup baik kemudian sebaiknya meningkatkan sosialisasi politik kepada orang dewasa. Pengetahuan serta wawasan terkait pemilihan kepala daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran

			<p>masyarakat meelang pilkaa. Selain itu, variabel tingkat pendidikan dengan indikator pendidikan dasar, menengah, dan tinggi mendapat respon kategori tinggi sebesar 54,16%. Hal ini sekaligus memberikan jawaban bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser yang termasuk tingkat pendidikan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan karena masih ada beberapa responden yang berbeda pendapat. kategori menengah serta rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan : salah satunya dengan membekas beasiswa kepada masyarakat miskin atau mendirikan sekolah gratis untuk pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas.</p>
4.	Irmasugiati	PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT	Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pengaruh pendidikan politik terhadap

		<p>TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2014 DI KELURAHAN LEORAN KABUPATEN ENREKANG</p>	<p>partisipasi politik masyarakat Desa Leoran Kabupaten Enrekang dalam kategori tinggi sebanyak 54 orang dengan persentase 58,70 persen dari total populasi. Sedangkan pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik masyarakat kategori menengah dan rendah masing-masing berjumlah 23 dan 15 orang dengan persentase masing-masing sebesar 25,00 persen dan 16,30 persen. Di antara ketiga indikator tersebut Mengenai dampak pendidikan politik terhadap partisipasi politik masyarakat bagaimana sudah diuraan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak pendidikan politik terdapat partisipasi politik masyarakat di Desa Leoran Kabupaten Enrekang relatif tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya responden yang memberikan standar tinggi</p>
--	--	--	--

			dalam hal ini.
5.	Bornadus Asa Abednego	PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA DKI JAKARTA 2017 DI KECAMATAN CAKUNG JAKARTA TIMUR	Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi pemilih pemula terhadap partisipasi politik pada Pemilu Legislatif Jakarta 2017. Kontribusi pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi pemilih pemula terhadap politik partisipasi Pilkada DKI tahun 2017 dapat dilihat dari koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai R^2 sebesar 0,108. Ini berarti levelnya Tingkat pendidikan dan ekonomi pemilih muda hanya memberikan pengaruh sebesar 10,8% terhadap partisipasi politik pada pemilu legislatif Jakarta tahun 2017, sedangkan 89,2%

			dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya.
--	--	--	--

II.2. Kerangka Teori

A. Pengertian Pendidikan

Pendidikan bukan sekedar kegiatan akademis, melainkan suatu proses pembangunan sosial yang mentransformasikan individu dari makhluk biologis menjadi makhluk sosial supaya dapat hidup harmonis dengan masyarakat dan dunia pada umumnya. Jadi, pendidikan merupakan proses penanaman nilai-nilai sosial (humanisme) dalam masyarakat sehari-hari. Menurut undang-undang n. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 1 menyatakan “bahwa pendidikan yaitu suatu usaha sadar dan terencana”. menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Secara umum pendidikan mengacu pada suatu proses pewarisan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya yang lebih mudah ditransfer untuk mempersiapkan generasi mendatang agar mewarisi kualitas hidup yang lebih baik, jasmani dan rohani. Pengertian pendidikan sebagai “usaha sadar untuk membantu manusia menjadi individu yang sehat agar potensi dirinya teraktualisasi dan dikembangkan hingga mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai.” diinginkan dengan belajar” diberikan dalam Ensiklopedia Pendidikan (Munandir, 2001: 229).

Pendidikan merupakan bimbingan langsung dari orang dewasa kepada anak-anak yang belum dewasa. Begitu pula harus mewujudkan potensi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang jasmani dan rohani. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan secara umum meliputi seluruh kegiatan generasi tua sebagai sarana penyampaian ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, kasih sayang dan semangat kepada generasi muda atau peserta didik.

sebagai cara mempersiapkan mereka untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani generasi berikutnya.

B. Jenis dan Jenjang Pendidikan

Lembaga pendidikan formal, disebut juga organisasi, dibentuk berdasarkan undang-undang formal, mempunyai program dan tujuan yang jelas, serta struktur untuk memantau dan memperbaiki kesalahan dalam penulisan atau bentuk ekspresi lainnya. Oleh karena itu, tujuan pendidikan ialah mempersiapkan peserta didik untuk mencapai tujuan atau standar yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya. Di antara orang-orang dalam masyarakat ini adalah pemerintah, orang tua, dan institusi kelompok sosial yang tertarik pada hasil pendidikan dan teknik pembelajaran di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa “sekolah adalah pendidikan formal yang didasarkan pada tujuan kelembagaan, yaitu proyek kelompok untuk mata pelajaran dan dimensi sekolah yang berbeda” (Tim Dosen FIP-IKIP. 2003: 147).

C. Bentuk-bentuk Pendidikan

Berdasarkan undang-undang n. 20 pasal 3 tahun 2003, pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat. . dan negara.

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, mandiri, serta menjunjung demokrasi dan moralitas. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dibedakan tiga jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan nonformal.

1. Pendidikan formal

Menurut Axin (Suprijanto, 2009:6), pendidikan formal diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan baik oleh siswa itu sendiri maupun dalam lingkungan kelas yang diselenggarakan oleh sekolah. Dengan demikian, pendidikan formal diartikan sebagai pendidikan terstruktur, yang meliputi jenjang pendidikan yang berlangsung dalam kurun waktu yang berkisar dari sekolah menengah atas hingga universitas.

Selain garis besar kurikulum secara umum, pendidikan formal juga mencakup berbagai program dan organisasi khusus yang digunakan untuk berbagai jenis pelatihan teknis dan profesional.

➤ Konsep pendidikan formal

Pendidikan formal merupakan jenis pendidikan yang paling umum di Indonesia, dimana kegiatan pembelajarannya lebih terstruktur dan metadis. Pendidikan formal meliputi pendidikan, kebudayaan, penelitian dan teknologi untuk menjamin agar pengetahuan masyarakat umum digunakan secara efektif dan efisien. Setiap individu yang menerima pendidikan formal akan menerima pengajaran keterampilan hidup dan kode moral yang lebih liberal sebagai prasyarat untuk integrasi mereka ke dalam masyarakat. Tujuan pendidikan Formal.

Berdasarkan teks pasal 2 ayat 3 UU n. 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan ialah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang jujur, taat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, bijaksana, kreatif, mandiri, serta melayani negara dan bangsa. Secara umum tujuan pendidikan formal adalah agar peserta didik dapat mengenal peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan mereka memasuki masyarakat dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.) Tingkat Pendidikan Formal

Ada tiga jenjang pendidikan formal yang disebutkan dalam undang-undang n. 20 Tahun 2003 yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

➤ Indikator pendidikan formal

Pendidikan formal diselenggarakan oleh lembaga yang dihormati dan telah mendapat persetujuan resmi dari pemerintah. Sistem pendidikan formal yang juga dikenal sebagai "sekolah swasta" dikelola oleh Depdikbud, Depag, dan Yayasan, suatu lembaga pendidikan khusus. Sesuai dengan nomor 13 pasal 1 undang-undang no. 20 Tahun 2003 untuk sistem pendidikan nasional, "pendidikan berlangsung pada

tiga jalur, yaitu formal, informal, dan nonformal”. 20 Tahun 2003 Sistem pendidikan nasional, indikator tingkat pendidikan dan kemampuan adaptasi peminatan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahapan pendidikan yang ditentukan menurut tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai dan keterampilan yang dikembangkan, yang terdiri atas :

1. Pendidikan dasar, yaitu pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik serta jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama bersekolah anak yang menjadi dasar pendidikan menengah. Bentuk : SD, SMA.
2. Pendidikan menengah, yaitu pendidikan dasar tingkat lanjut. Bentuk : SMA, SMK, MA sederajat.
3. Pendidikan tinggi, yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Bentuknya adalah: program menengah, universitas, magister, doktoral dan khusus yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan di Indonesia terdiri dari tiga komponen utama: pendidikan dasar, pendidikan kejuruan, dan pendidikan tinggi. Pendidikan ini bervariasi mulai dari pendidikan menengah yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk membekali masyarakat dengan keterampilan akademik/profesional yang dapat diterapkan, mengembangkan/menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

1. Pendidikan Informal

Menurut Axin (Suprijanto, 2009:8), pendidikan informal diartikan sebagai pembelajaran dimana siswa belajar tanpa pengajaran formal dan dengan kombinasi pengajaran informal dan formal untuk menunjang pembelajarannya. Pendidikan informal diartikan sebagai pendidikan tanpa program yang jelas dan tepat. Pada dasarnya pendidikan informal berlangsung secara berkelompok. Dalam sejarah pendidikan dijelaskan bahwa masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang paling alamiah, yaitu masyarakat. Konsep Pendidikan Informal.

Melalui pendidikan kelompok informal, anak terlebih dahulu mendapat bimbingan dan dukungan untuk mengembangkan nilai, moral, keterampilan dasar, nilai budaya, nilai agama, dan karakternya. Faktanya, sebagian besar anak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh teman sebayanya. Oleh karena itu, orang tua memegang peranan penting dalam mendidik anak sejak dini.

➤ Indikator-indikator Pendidikan Informal

Adapun indikator informal sebagai berikut :

1. Perilaku bersikap dan berkepribadian

Sikap dan kepribadian unik setiap karyawan menjadikan pekerjaannya unik

2. Pendidikan dari keluarga

Pendidikan pertama yang didapatkan dari lingkungan terdekat. Pendidikan dari keluarga akan selalu diingat dan dimanfaatkan dalam kehidupan.

3. Pendidikan dari lingkungan

Pendidikan yang didapatkan dari lingkungan sekitar yang diperoleh dari keluarga baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Dari pendidikan

tersebut nantinya peserta didik akan mengerti dan berinteraksi social dengan sesama.

4. Pendidikan dari media

Pendidikan yang didapatkan dari media. Dengan menggunakan media pekerjaan akan menjadi lebih mudah terselesaikan.

2. Pendidikan Nonformal

Menurut Axin (Suprijanto, 2009:7), pendidikan nonformal diartikan sebagai kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan pembelajaran tatap muka dalam lingkungan yang terorganisir (terstruktur) di luar sistem persekolahan..

➤ Konsep Pendidikan Nonformal

Istilah "pendidikan non-formal" mengacu pada jenis pendidikan kurang formal yang dapat diberikan secara terstruktur dan ketat. Bidang pendidikan nonformal meliputi organisasi sekolah, kelompok bimbingan belajar, komunitas belajar, pusat pendidikan komunitas, acara pembelajaran komunitas dan organisasi pendidikan khusus. Pendidikan ini ditujukan kepada masyarakat umum yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, pengayaan atau perluasan pendidikan formal. Tujuannya adalah meningkatkan potensi peserta didik dengan cara mengajar dalam bidang pemahaman dan pengayaan, serta pengembangan sikap dan kepribadian.

Dengan demikian, pendidikan nonformal akan lebih fleksibel dalam hal pengajaran atau pembelajaran, sehingga menghasilkan hasil yang lebih berhasil sesuai dengan kebutuhan individu. Di RI, undang-undang n. 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional digambarkan sebagai proses yang menggunakan pendidikan

sebagai alat dan lapangan untuk menunjang pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan kualitas dirinya menjadi terpelajar, bertakwa, berjiwa besar, hingga berakhlak mulia serta dapat dibutuhkan oleh bangsa, negara, masyarakat dan dirinya sendiri (Fokusmedia, 2003: 3).

Suksesnya perencanaan pendidikan diperlukan beberapa kondisi, yaitu :

Perhatian terbesar diberikan pada distribusi kekuasaan untuk mengambil keputusan politik,

- Perhatian yang lebih besar diberikan pada pengembangan kebijakan dan prioritas pendidikan yang ditargetkan,
- Tugas utama perencana pendidikan adalah mengarahkan pengembangan dan penyediaan alternatif teknis sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan pendidikan.
- Pemerintah harus melipatgandakan upayanya untuk mengetahui opini publik mengenai perkembangan dan arah pendidikan di masa depan,
- Administrator pendidikan harus lebih aktif mendorong perubahan dalam perencanaan pendidikan,
- Ketika pemerintah tidak lagi menguasai seluruh aspek pendidikan, maka perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi yang mempunyai otoritas di bidang pendidikan.

Adapun indikator prestasi menurut Syah (2012:217-218) : ranah kreativitas (kognitif), ranah rasa (afeksi), dan ranah karsa (psikomotor). Adapun penjabaran dari masing-masing indikator sebagai berikut :

- 1) Ranah kreativitas (kognitif), terdiri dari pengamatan, ingatan, pemahaman, penerapan/penerapan, analisis (pemeriksaan dan pengurutan secara cermat) dan sintesis (membuat hubungan-hubungan baru dan utuh)
- 2) Ranah rasa (afeksi), terdiri dari penerimaan, penerimaan, evaluasi (sikap evaluatif), internalisasi (pendalaman) dan penokohan (evaluasi)
- 3) Ranah karsa (psikomotor), terdiri atas keterampilan motorik dan keterampilan ekspresi verbal dan nonverbal.

II.2.2. Partisipasi Politik

Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, sebagai bangsa dan sebagai kelompok masyarakat. Komunitas merupakan faktor penting dalam memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan tata kelola yang efektif hingga tingkat negara bagian. Menurut Inu Kencana Syafii, dalam kerangka pemerintah Indonesia jelas disebutkan bahwa partisipasi diartikan sebagai usaha dan kemauan setiap individu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan tempat mereka untuk pada akhirnya mendukung individu-individu tersebut dalam mencapai tujuan mereka dan berkontribusi pada setiap upaya bersama (Inu Kencana Syafii, 2002: 132).

Dalam *The Development of Political Participation*, Samuel P. Huntington (1994: 4) mendefinisikan “partisipasi politik sebagai warga negara yang bertindak sebagai individu dengan tujuan mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. “Jenis partisipasi ini bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, disengaja atau terbuka, legal atau ilegal, efektif dan tidak efektif, dan tidak boleh digunakan untuk merendahkan orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1983: 763), politik berarti seluruh pembahasan serta perdebatan (strategi, bisnis, dan lain-lain) mengenai kebijakan suatu negara pada negara lain, baik yang bersifat umum maupun khusus, dan dapat juga digunakan sebagai dan nama untuk beberapa hal, tempat, dan bidang studi. Politik menurut Aristoteles adalah suatu bentuk masyarakat sipil yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan memajukan isu-isu keadilan sosial yang mempengaruhi seluruh anggota masyarakat (Ramlan Surbakti, 2007: 3).

Menurut Miriam Budiarjo (2000: 8), politik diartikan sebagai “berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menghambat proses penetapan tujuan sistem dan pelaksanaan tujuannya. Apa yang dilakukan pemerintah berada pada tingkat pusat dan nasional suatu negara, yang disebut dengan kepala negara. Jika tidak ada partisipasi politik dari masyarakat, maka kepemimpinan negara tidak dapat berfungsi. secara efektif. Partisipasi tersebut merupakan suatu inklusi warga negara pada semua tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan hingga evaluasi keputusan, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam implementasi keputusan. Selama ini dapat dikatakan peran warga negara dalam partisipasi politik sangat kurang (Gatara & Dzulkiah Said, 2007: 90-91).

Dalam buku Pengantar Ilmu Politik yang ditulis oleh Deden Faturahman dan Wawan Sobari, Miriam Budiarjo menyatakan bahwa “partisipasi politik ialah kegiatan individu maupun berkelompok yang bertujuan untuk berpartisipasi dan merasakan kehidupan politik, dimulai dari pengakuan kepentingan dan pengaruh

nasional secara bertahap. atau segera di pemerintahan. politik (kebijakan publik)” (Budiarjo dalam Faturahman dan Sobari, 2004: 185).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian ilmu politik di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kesediaan individu atau kelompok masyarakat untuk memberikan kontribusi terhadap tujuan dan cita-cita negara, atau komitmen yang kuat terhadapnya. . Oleh karena itu, partisipasi dalam proses politik dapat berupa kegiatan positif atau negatif, namun selalu bertujuan untuk menjadi partisipan aktif di kehidupan politik negara dengan tujuan mempengaruhi kebijakan. pemerintah. Aktivitas seseorang ataupun sekelompok orang yang aktif pada politik memilih seorang kepala negara, baik langsung ataupun tidak langsung, sangat berpengaruh dalam segala kebijakan yang terdapat pada pemerintah. Ini dikarenakan orang maupun kelompok yang aktif adalah yang paling utama untuk memperhitungkan aktivitas politik pada penetapan kepala negara ataupun kepala pemerintahan.

a. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi seseorang tercermin pada aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi yang paling umum adalah pemungutan suara, baik untuk memilih calon wakil rakyat, maupun untuk memilih kepala negara. Dalam buku Pengantar Sosiologi Politik (Rafael Raga Maran, 2001: 148). Berikut bentuk-bentuk partisipasi politik :

- Memegang posisi politik atau administrative
- Mencari posisi politik atau administrative
- Menjadi anggota aktif organisasi politik

- Menjadi anggota pasif suatu organisasi politik
- Menjadi anggota aktif organisasi semi-politik
- Menjadi anggota pasif dalam organisasi semi-politik
- Partisipasi dalam demonstrasi, demonstrasi
- Partisipasi dalam diskusi kebijakan internal
- Partisipasi dalam pemungutan suara

Sementara itu Maribeth dan Goel (Rahman, 2007:289) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa bagian kategori meliputi ;

1. Apatis, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spektator, yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
3. Gladiator, yaitu mereka yang aktif terlibat dalam proses politik seperti komunikator, aktivis partai, dan aktivis masyarakat.
4. Pengkritik, yaitu orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Maribeth dan Goel (Rahman, 2007: 289) membedakan partisipasi politik dalam beberapa kategori, antara lain :

1. Apatis, artinya masyarakat yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Penonton, yaitu orang yang telah memberikan suara sekurang-kurangnya satu kali dalam suatu pemilu.
3. Gladiator, artinya mereka yang terlibat aktif dalam proses politik, seperti komunikator, aktivis partai, dan aktivis komunitas.
4. Kritikus, maksudnya orang yang berpartisipasi dengan cara yang tidak lazim.

Menurut Rahman (1995:77), kampanye politik yang menganut prinsip partisipasi politik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Partai politik yang ada di berbagai negara dan era diklasifikasikan sebagai partai konvensional atau non-konvensional, termasuk partai politik yang legal (seperti petisi) atau ilegal, memberontak atau penuh kekerasan. Frekuensi partisipasi politik dapat digunakan untuk mengukur stabilitas sistem politik dan integritas kehidupan politik suatu masyarakat nasional.

Bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond (Syarbaini, 2002:70) terbagi menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi nonkonvensional. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Bentuk-bentuk partisipasi politik

Konvensional	Non Konvensional
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi Politik	Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi, mogok
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Tindak kekerasan politik harta benda (pengerusakan, pengeboman)
Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative	Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)

Sumber : Almond dalam Syarbaini, 2002:71

Dari sudut pandang lain, Roth dan Wilson dalam Syrbani (2002: 70) menggambarkan bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat nasional menurut intensitasnya. Intensitas yang lebih rendah digunakan sebagai sarana komunikasi, intensitas yang lebih tinggi digunakan sebagai partisipan aktif, dan seterusnya. Rupanya, intensitas aktivitas politik warga negara menyebabkan terbentuknya apa yang disebut “Piramida partisipasi politik”.

Gambar 2.3 Piramida Partisipasi Politik



Sumber : David F. Roth dan Frank L. Wilson dalam Syarbaini, 2002:7

Kelompok terendah dalam grafik partisipasi politik ini adalah masyarakat umum, yang seringkali tidak terpengaruh dan terkadang berpartisipasi dalam kegiatan politik yang diselenggarakan oleh Roth dan Wilson, disebut apolitis. Kelompok yang paling dekat dengan kelompok apolitis adalah kelompok pengamat. Kelompok ini biasanya terlibat dalam kegiatan politik seperti melindungi hak-hak masyarakat, menangani masalah politik, berpartisipasi dalam liputan media mengenai perkembangan politik, dan memberikan nasehat kepada masyarakat

umum. Hal berikutnya yang menonjol adalah kelompok pengamat yaitu kelompok peserta.

b. Tujuan Partisipasi Politik

Kondisi masyarakat sangat berbeda-beda, namun setiap anggota masyarakat mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan dengan cara yang berbeda-beda melalui bentuk kegiatan yang berbeda-beda. Jadi, dalam hal partisipasi politik, tujuan yang harus dicapai oleh setiap anggota kelompok berbeda-beda.

Menurut Davis dalam Sastroatmodjo (1995:85), tujuan partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi persepsi masyarakat, baik positif maupun negatif, baik tertulis maupun lisan, agar mereka memahami atau memahami pentingnya partisipasi politik. Tujuan ini sangat penting karena partai politik atau pemerintah merupakan organisasi politik yang mampu mempengaruhi keputusan politik. . Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi warga mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Dukungan terhadap program pemerintah, artinya partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendukung program politik dan pembangunan.
- Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.

Dengan demikian, partisipasi politik sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat dapat menjadi sarana pemberian masukan, kritik dan saran kepada pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,

sedangkan bagi pemerintah partisipasi politik merupakan mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol pemerintah dan pelaksanaan kebijakan. .

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik

Eman Hermawan (2001:72) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah :

- 1) Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, media, sistem budaya, dan lain-lain.
- 2) Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, teman keluarga, kelas sosial, dan sebagainya.
- 3) Struktur kepribadian tercermin dalam sikap individu.
- 4) Faktor sosial politik langsung berupa situasi, yaitu kondisi yang langsung mempengaruhi para aktor ketika hendak melakukan aktivitas politik, seperti suasana dalam kelompok, ancaman, dan lain-lain.

Bagian ini dipengaruhi secara negatif oleh status sosial masyarakat umum (pendidikan dan perlindungan sosial) dan juga oleh faktor lokal dan lingkungan (Budiarjo, 1998: 47). Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam memilih untuk pertama kalinya dibahas dengan cara dan konteks yang berbeda, begitu pula dengan keterlibatan masyarakat pemilih untuk pertama kalinya dalam mobilisasi masyarakat untuk pemilu tahun 2020.

Mohtar Mas'oe'd (2008: 61) berpendapat bahwa selain melemahkan pengaruh pendidikan dan sosial ekonomi, tipe pemimpin yang berbeda juga berdampak negatif terhadap kemauan seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Misalnya,

laki-laki lebih cenderung berpartisipasi dalam kegiatan sosial dibandingkan perempuan, dan orang-orang dengan status sosial yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dibandingkan mereka yang berstatus sosial lebih rendah.

d. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan umum pimpinan daerah dan wakil pimpinan daerah yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah provinsi/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih pimpinan daerah dan pimpinan daerah. . (Pasal 1 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005).

Pemilihan kepala desa atau disebut juga Pilkades merupakan salah satu jenis pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi oleh warga setempat atau masyarakat sekitar. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Kepala Negara, Kepala Desa merupakan abdi yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk asli. Dalam buku “Hegemoni Politik Negara Pedesaan Jawa”, Duto Socialismanto menyatakan bahwa pemilu pedesaan merupakan pesta kerakyatan. Pemilu di negara ini digambarkan sebagai sebuah cara untuk memberdayakan mereka yang mampu. meringankan kebutuhan masyarakat (Sosialismanto, 2001: 191). Pemilihan kepala desa atau disebut juga pilkades biasanya diselenggarakan secara tertutup oleh masyarakat calon setelah menunaikan kewajiban agama. Pemilihan negara melalui tahapan nominasi dan pemilihan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Walikota Negara, pasal 1 ayat (5), menetapkan bahwa pemilihan walikota negara merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara

untuk memilih walikota negara secara langsung. , umum, bebas, rahasia, adil, serta jujur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pemimpin Negara diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Anggaran Dasar berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bagi negara-negara yang perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Negara.

Di dalam bab 2 Pemilihan Kepala desa disebutkan bahwa pasal (2) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Pasal (3) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a) pengelompokan waktu berakhirnya amanat walikota desa dalam wilayah Kabupaten/Kota,
- b) kemampuan keuangan daerah dan/atau,
- c) ketersediaan pejabat di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa dalam penjabat.

Pada ayat (2), pemilihan kepala negara melalui siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Batas waktu pemilihan negara nirkabel dibatasi paling lama dua tahun, sebagaimana dijelaskan pada ayat (3). Pemilihan walikota desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2

(dua) tahun. Aturan pelaksanaan pemilihan pemimpin negara dibagi menjadi 5 bagian besar, mulai dari pasal 6 sampai dengan pasal 44. Bagian pertama mengenai tahapan pelaksanaan pemilihan pemimpin negara diatur dalam pasal 6 Permendagri 112/2014 : a. persiapan, b. janji temu, c. suara dan d. tekad persiapan pemilihan walikota negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, yang terdiri atas :

- a. Pemberitahuan dari lembaga permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang berakhirnya amanah, disampaikan kepadanya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya amanah,
- b. Terbentuknya komisi pemilihan kepala negara oleh badan musyawarah negara ditentukan pada 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan berakhirnya mandat.
- c. Laporan akhir penugasan walikota desa kepada bupati/walikota kota madya disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan berakhirnya penugasan.
- d. Perencanaan biaya penyelenggaraan pemilu disampaikan oleh komisi kepada bupati/walikota melalui walikota kecamatan atau penunjukan lain dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya komisi pemilihan, dan
- e. Persetujuan biaya pemilu oleh bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari pada saat diserahkan kepada komisi..

Pembentukan panitia pemilihan walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada bupati/walikota melalui walikota kecamatan. Ini adalah tugas komisi pemilihan walikota negara tersebut :

- Merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu,
- Merencanakan dan menyampaikan biaya pemilu kepada bupati/walikota melalui camat.
- Melakukan registrasi dan identifikasi pemilih,
- Melakukan penyaringan awal dan penyaringan terhadap calon potensial,
- Identifikasi kandidat yang memenuhi persyaratan,
- Untuk menetapkan prosedur pelaksanaan pemilu,
- Menentukan metode pelaksanaan kampanye,
- Memfasilitasi penyediaan peralatan, perbekalan dan tempat pemungutan suara,
- Pilih,
- Menentukan hasil pemungutan suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara,
- Menentukan calon kepala negara terpilih dan
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilu.

Sesuai dengan PP No.7 Tahun 2005, Permendagri No.112 Tahun 2014, UU No.72 Tahun 2005 dan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mendefinisikan bahwa suatu negara atau disebut dengan nama lain, yang berikutnya disebut negara, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut tempat tinggalnya serta adat istiadatnya, juga dikenal dan dihormati di negara tersebut. sistem pemerintahan

republik Indonesia. Terapkan PP n. 2005, Permendagri no. 12 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. diri . Oleh karena itu, cara mewujudkan lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila adalah melalui pemilu. (Pamudji, 1985 : 147).

II.2. Definisi Konsep

1. Pendidikan formal, yaitu jenjang pendidikan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan tinggi. (Axine (Suprijanto, 2009:6).
2. Partisipasi politik, yaitu kegiatan warga negara yang beraksi sebagai perseorangan berdasarkan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dan bersifat perseorangan maupun kolektif, terstruktur ataupun spontan, damai maupun kekerasan, legal atau ilegal, efektif dan tidak efektif, serta mencakup kegiatan dan bukan sikap. (Samuel P. Huntington (1994: 4).
3. Pemilihan walikota desa atau disebut juga Pilkades adalah pemilihan walikota desa secara langsung oleh penduduk/masyarakat setempat dengan melibatkan partai kerakyatan, yang juga diartikan sebagai kesempatan untuk mencalonkan seseorang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat. Pemilihan desa umumnya dipilih langsung oleh warga yang berhak. Tindakan tersebut bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan adil serta berlangsung dalam tahap pencalonan dan pemilihan. (Sosialismanto, 2001 : 191).

II.3 Definisi Operasional

Definisi Operasional Variabel Menurut Walgito (2004: 4-5), definisi yang diberikan terhadap suatu variabel atau konstruk didasarkan pada bagaimana

memahaminya atau bagaimana menjelaskan suatu tugas tertentu atau menyediakan variabel operasional.

Dalam pengoperasian variabel, peneliti menguraikan variabel yang digunakan beserta indikatornya. Tujuan peneliti mendeskripsikan variabel dan indikatornya adalah untuk memudahkan penelitian dan memudahkan pengukuran variabel-variabel tersebut. Variabel yang digunakan adalah variabel kesadaran politik sebagai variabel independen dan variabel partisipasi politik sebagai variabel dependen. Variabel independen yaitu kesadaran politik (X) mempunyai empat indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku.

Tabel 2.3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukur	Jumlah Pernyataan	
1	Pendidikan Formal X	Pendidikan Formal	Tingkat perkembangan peserta didik	Skala Likert	7	
			Tujuan yang akan dicapai			
			Potensi yang dikembangkan			
		Pendidikan Informal	Perilaku bersikap dan berkepribadian	Skala Likert	6	
						Pendidikan dari keluarga
						Pendidikan dari lingkungan
						Pendidikan dari media
		Pendidikan Nonformal	Mengembangkan potensi peserta didik	Skala Likert	6	
						Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
						Pengembangan sikap dan kepribadian
Jumlah Pernyataan			19			

2	Partisipasi Politik Y	Aktif (Konvensional)	Ikut berpartisipasi dalam pemberian suara	Skala Likert	3
			Ikut menciptakan situasi yang kondusif		
			Ikut berperan aktif dalam pilkades		
			Ikut mensukseskan pilkades		
			Komunikasi individual dengan pejabat publik		
	Non Konvensional	Berdemonstrasi	Skala Likert	3	
		Mengkritisi hasil pilkades			
		Tidak mengikuti kampanye			
	Jumlah Pertanyaan			5	

Sumber : <http://repository.uinjkt.ac.id>

II.4. Hipotesis

Menurut Suharsimi Arikunto (1995: 71), “hipotesis diartikan sebagai suatu alternatif jawaban yang diduga diberikan oleh penelitian terhadap suatu permasalahan, yang bersifat sementara dan kebenarannya dibuktikan oleh data yang dikumpulkan untuk penelitian”.

Hipotesis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan temuan penelitian yang perlu dievaluasi atau dibahas berdasarkan teori yang dihasilkan dari sampel pasien. Ada dua jenis hipotesis: hipotesis nol (H_0) menyatakan tidak ada

hubungan antar variabel, sedangkan hipotesis alternatif (H1) menyatakan ada hubungan antar variabel. Demikian hipotesis penelitian ini yaitu :

- **(H0) Tidak terdapat hubungan antara perbedaan jenjang pendidikan formal dengan perbedaan partisipasi politik pada pemilu tahun 2020 di Desa Bulu.**
- **(H1) Terdapat hubungan antara perbedaan jenjang pendidikan formal dengan perbedaan partisipasi politik pada pemilu tahun 2020 di Negeri Bulu.**
- **(H0) Tidak terdapat pengaruh antara variabel tingkat pendidikan formal terhadap variabel partisipasi politik pada pemilukada tahun 2020 di negara Bulu.**
- **(H1) Terdapat pengaruh antara variabel tingkat pendidikan formal terhadap variabel partisipasi politik pada pemilukada tahun 2020 di negara Bulu.**

Hipotesis tersebut dapat dilihat jelas pengaruhnya dengan model geometrikal sebagai berikut :

Gambar 2.1
Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal terhadap Partisipasi Politik

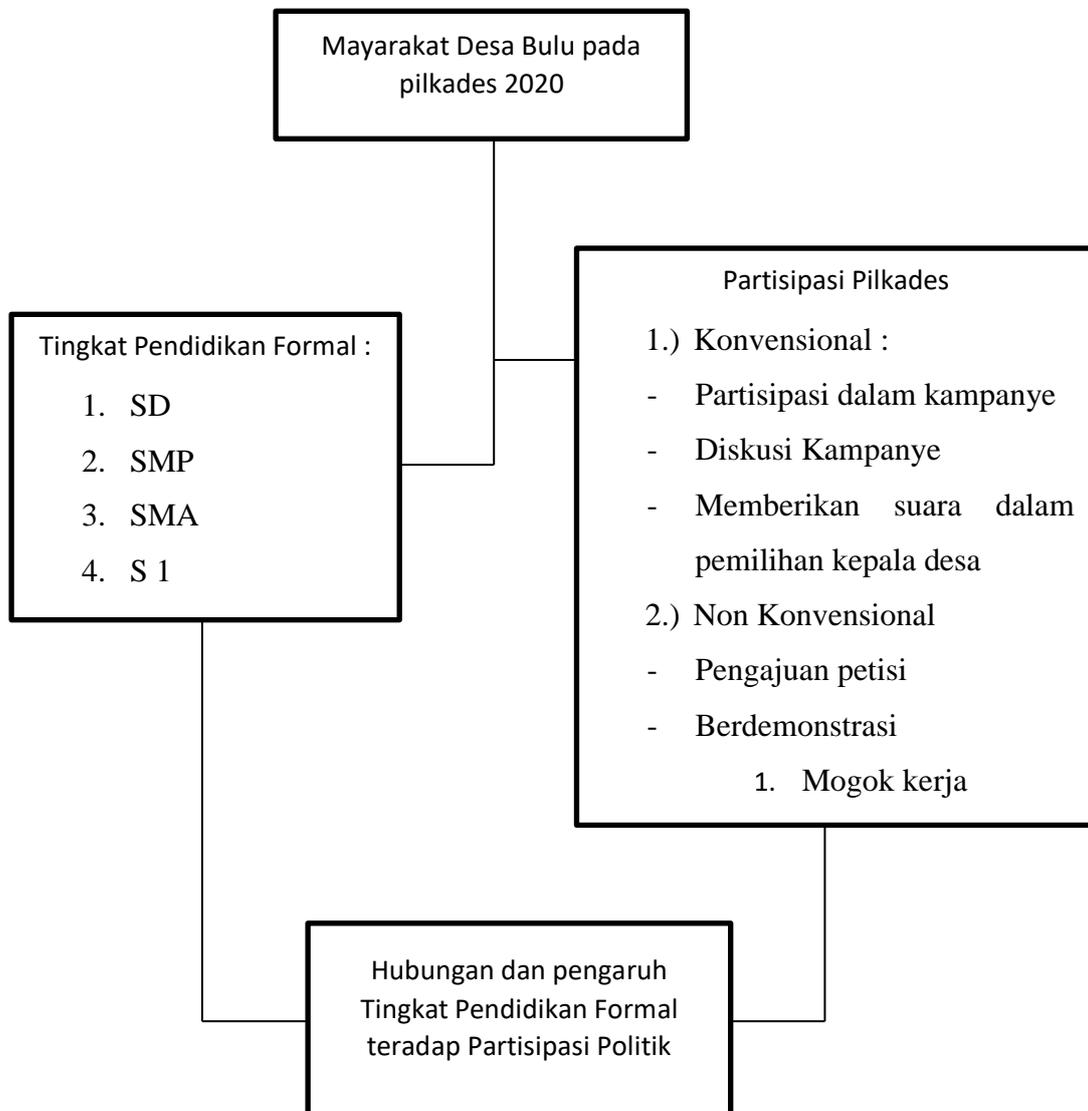


Diagram kerangka di atas menunjukkan bahwa perjalanan penelitian peneliti dimulai dari masyarakat Desa Bulu. Pada Pilkadaes tahun 2020, Desa Bulu menjadi daerah dengan jumlah pemilih tertinggi di Kecamatan Petarukan dengan perolehan suara sebesar 74,53%. Peneliti ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan formal mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam peristiwa besar tersebut. Untuk mengukur tingkat pendidikan formal, peneliti menggunakan empat indikator menurut

Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan, kecerdasan, sikap dan pola tingkah laku. Sementara itu, untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat, peneliti menggunakan dua indikator yaitu partisipasi dalam kegiatan kampanye dan partisipasi dalam kegiatan pemilu suatu negara menurut Kaase dan Marsh. Para peneliti memasukkan data ke dalam klasifikasi yang menunjukkan apakah tingkat pendidikan dan partisipasi formal rendah atau tinggi. Bagian selanjutnya dari kerangka ini adalah definisi bagaimana kekuatan hubungan dan pengaruh variabel tingkat pendidikan formal dan partisipasi politik dengan penerapan SPSS v20. Setelah perhitungan selesai, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah suatu metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:150). Menurut Sugiyono (2016), penelitian berdasarkan tingkat penjelasannya (tingkat kejelasannya) dapat digolongkan menjadi :

a. Penelitian deskriptif

Penelitian digunakan untuk melihat nilai variabel independen, yaitu satu maupun lebih variabel (independen), tanpa melakukan kesetaraan atau kaitan dengan variabel lain.

b. Penelitian komparatif

Penelitian komparatif, disini variabelnya selalu sama dengan variabel bebasnya, namun sampelnya lebih dari satu, atau pada kurun waktu berbeda.

c. Penelitian asosiatif

Penelitian berfungsi untuk memahami kaitannya antara dua variabel atau lebih.

Pencarian ini memiliki level tertinggi dalam hal deskripsi dan perbandingan. Hal ini dikarenakan penelitian dapat mengembangkan pada teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan serta mengendalikan suatu masalah. Sedangkan menurut jenis penelitiannya, Sugiyono (2016) dapat dibedakan menjadi dua.

Menurut Mardalis (2004: 26), penelitian eksplanatori bukan hanya memberikan pengetahuan tentang adanya fenomena sosial tertentu yang menjadi objek perhatian khusus, tapi juga bagaimana kaitannya pada fenomena sosial lain serta mengapa hubungan tersebut demikian. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi jika variabel tertentu dikendalikan ataupun dimanipulasi dengan cara tertentu. Untuk mengolah data penelitian kuantitatif digunakan dua metode yaitu menggunakan statistik deskriptif dan inferensial.

Tujuan dari statistik deskriptif adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu fenomena atau pernyataan sosial melalui penggunaan variabel deskriptif yang berhubungan pada penelitian. Menurut Sugiyono, tujuan penelitian ini adalah menganalisis data dengan menggunakan metode seperti data mining, data augmentation, atau analisis data berdasarkan data yang dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dibuat grafik. Metode statistik inferensial adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis, merangkum, meringkas dan menarik kesimpulan berdasarkan data longitudinal. Tujuannya adalah untuk menggeneralisasi hasil penelitian individu kepada populasi. Data ini diharapkan dapat menangkap dan mendeskripsikan keseluruhan populasi. Peneliti menggunakan aplikasi/software Statistical Product Service Solution v20 (SPSS versi 20) untuk melakukan statistik inferensial.

III.2. Populasi dan Sampel Penelitian

III.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsimi Arikunto (2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah banyaknya masyarakat yang mempunyai hak

hukum dan memenuhi syarat hukum di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Subyek penelitian ini jumlah penduduk Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang sebanyak 4.093 jiwa dari jumlah penduduk 6.154 jiwa menurut data demografi.

.Tabel 3.1

**Data Jumlah Sebaran Penduduk Desa Bulu Kabupaten Pemalang
Kecamatan Petarukan dan Mempunyai Hak Pilih.**

Populasi	Laki-laki	Perempuan	Pemilih Tetap	Jumlah TPS
6.154	3.034	3.120	4.093	9

Sumber : Pengolahan data pemilihan, 2020

Berdasarkan data maka jumlah mata pilih di desa Bulu Kecamatan Kabupaten Pemalang sebanyak 4.093 dari populasi penduduk 6.154 jiwa.

1. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakilinya. Sampel dapat digunakan dan dipilih karena mempunyai sifat dan karakteristik yang sama dengan populasi sehingga dapat mewakilinya. Contoh kriteria yang dipilih oleh peneliti berikut ini adalah:

- a. Pemilih harus berusia sah, minimal 17 tahun.
- b. Menikah, sudah menikah, atau belum pernah menikah.
- c. Orang-orang yang terdaftar di DPT pada pemilu negara tahun 2020 telah atau belum menggunakan hak pilihnya.
- d. Terdaftar DPT Desa Bulu Tahun 2020. Untuk menentukan hasil sampel yang akan digunakan, peneliti menggunakan rumus Slovin pada tingkat signifikansi atau margin of error sebesar 10%.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yang menggunakan kuesioner sebagai alat terpenting pengumpulan data. Peneliti memakai random sampling untuk memastikan bahwa setiap sampel populasi mempunyai temperamen maupun watak yang sama. Dalam penelitian ini, besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan teknik Pengambilan sampel Solvin untuk populasi telah dibahas dalam Siregar (2013:34). Sangat jarang jumlah variabel yang dianalisis berasal dari dua atau tiga sampel yang digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini disajikan variabel independen dan dependen (Sugiyono 2017:140).

III.2.3 Skala Pengukuran

Skala pengukuran pada penelitian ini yaitu skala likert, yang digunakan untuk menyesuaikan variabel-variabel yang mengukur tingkat pendidikan formal masyarakat umum. Skala Likert merupakan alat ukur untuk mengukur persepsi, pendapat bahkan sikap individu atau kelompok individu terkait dengan fenomena sosial yang terjadi saat ini. Untuk menjawab 19 pertanyaan yang diajukan peneliti, tersedia delapan jawaban untuk Anda. Evaluasi terhadap alternatif jawaban adalah sebagai berikut :

1. Skor 3 jika menjawab setuju
2. Skor 2 jika menjawab tidak setuju
3. Skor 1 jika menjawab sangat tidak setuju

Sedangkan untuk mengukur perbedaan tingkat partisipasi masyarakat digunakan skala Guttman. Skala Guttman merupakan alat ukur yang digunakan untuk memperoleh jawaban yang konsisten dari responden mengenai permasalahan atau fenomena yang dialami, misalnya “ya” atau “tidak”, “baik” atau “buruk”, “tidak

pernah” atau “tidak pernah”, “positif” atau "negatif" dan pilihan alternatif lainnya.

Skala Guttman yang digunakan memiliki 11 indikator pertanyaan dua pilihan

Jawabannya adalah “ya” dan “tidak”. Evaluasi terhadap alternatif jawaban adalah sebagai berikut :

1. Skor 2 jika menjawab ya
2. Skor 1 jika menjawab tidak

III.3. JENIS DAN MACAM DATA

III.3.1 Jenis Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, maka dalam pelaksanaannya data dan informasi yang diperoleh akan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

A. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti:

- a.) Data karakteristik responden
- b.) Data hasil jawaban responden mengenai variabel tingkat pendidikan formal, partisipasi politik dan pemilihan pemimpin negara.

B. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang melengkapi data primer yang diperoleh melalui dokumen atau laporan tertulis, seperti data yang berkaitan dengan gambaran objek penelitian yaitu pengaruh tingkat pendidikan formal terhadap partisipasi politik dalam pemilihan presiden. negara. desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang.

III.4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data yang terdapat pada penelitian ini :

1. Kuesioner

Kuesioner atau disebut juga kuesioner mempunyai banyak keunggulan sebagai alat pengumpulan data. Dalam hal ini kuesioner dikirimkan kepada Camat Desa Bulu dan sebagian besar warga Desa Bulu. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan jawaban yang diberikan sehingga responden dapat memilih satu persatu.

2. kuesioner

Langkah ini dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis secara diam-diam hasil penyelidikan terhadap anomali-anomali yang ada terkait dengan objek yang diteliti. Jadi peneliti sibuk mengumpulkan data yang diperlukan selama proses ini.

3. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan membaca referensi yang berhubungan pada penelitian ini. Misalnya: dari literatur, buku, artikel dan hasil penelitian sebelumnya.

III.5. TEKNIK ANALISIS DATA

III.5.1 Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi data yang diperoleh dari hasil survei, dokumen dan sumber lainnya. Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif yang terdiri dari analisis deskriptif dan inferensial. Banyak tes yang digunakan dalam analisis inferensial untuk

menentukan kesimpulan penelitian. Misalnya : dari literatur, buku, artikel dan hasil penelitian sebelumnya. Berikut analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini :

III.5.2. Analisis Data Deskriptif

Teknik ini berfungsi sebagai menganalisis data dengan cara menjelaskan dan menyajikan data yang sudah diperoleh dan digunakan dalam proses inferensi tanpa menghasilkan hasil yang dapat digeneralisasikan atau diterapkan secara universal. Dalam penelitian ini analisis deskriptif juga digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian serta demografi responden dan partisipan di wilayah penelitian.

III.5.3 Analisis Inferensial

1. Uji isntrumen penelitian

Dalam proses wawancara menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas menentukan valid atau tidaknya instrumen penelitian dan apakah hasilnya sesuai dengan konsep yang akan dibahas. Uji validitas instrumen sangat penting untuk mengetahui apakah pertanyaan yang kita ajukan dalam kuesioner benar atau tidak. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui keakuratan instrumen tanpa bias dan juga dapat memastikan bahwa hasil instrumen stabil dan bisa digunakan dalam waktu yang berbeda.

Kemudian setelah mengumpulkan data di lapangan, langkah selanjutnya adalah mengolah statistik inferensial. Peneliti menggunakan aplikasi/software Statistical Product Service Solution v20 (SPSS versi 20).

2. Teknik Uji Hipotesis

Teknik Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji validitas

Dalam proses wawancara menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas menentukan valid atau tidaknya instrumen penelitian dan apakah hasilnya sesuai dengan konsep yang akan dibahas.

2. Uji kredibilitas (reliabilitas)

Tujuannya adalah untuk mengetahui keakuratan instrumen tanpa prasangka, dan pengujian ini dapat memastikan bahwa hasil instrumen stabil dan dapat digunakan pada waktu yang berbeda.

1. Uji Asumsi Dasar

Berikutnya adalah asumsi dasar. Untuk melakukan analisis korelasi dan regresi, dasar uji harus dilakukan. Dengan demikian, data primer yang diperlukan untuk melakukan analisis ini harus memiliki distribusi normal dan linier. Asumsi dasar terdiri dari tiga asumsi utama: normalitas, homogenitas, dan linieritas.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah langkah yang perlu dilakukan untuk melihat variabel mana yang berdistribusi normal atau tidak normal. Dalam analisis regresi, data yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Pengecekan normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji skewness-kurtosis. Kesimpulan utama dari analisis ini adalah data berdistribusi normal jika rasio skewness-kurtosis berada di antara -2 dan +2. Untuk menghitung rasionya adalah sebagai berikut:

- a. Rasio skewness = statistic skewness/ Std. Error skewness
- b. Rasio kurtosis = statistic kurtosis/ Std. Error kurtosis

3. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan agar peneliti dapat melakukan uraian komparatif yakni uji independen sampel t test dan uji anova. Tujuan adanya uji homogenitas adalah untuk melihat variasi data populasi, apakah mempunyai varians sama atau berbeda. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji homogenitas adalah :

- a. Jika nilai Sig. > 0,05, maka distribusi data homogen.
- b. Jika nilai Sig. < 0,05, maka distribusi data tidak homogen.

4. Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk melihat kondisi suatu variable, apakah mempunyai korelasi yang signifikan atau tidak. Uji ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk melakukan analisis korelasi maupun regresi linear. Pengambilan keputusan ini berdasarkan :

- a. Apabila Sig. Deviation from linearity > 0,05 maka terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b. Apabila Sig. Deviation from linearity < 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen.

5. Uji Korelasi

Uji atau korelasi merupakan jenis statistik inferensial yang berfungsi untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel. Apakah variabel tersebut memiliki Hubungan dan bagaimana arah hubungan tersebut. Uji yang akan dipakai ialah

korelasi pearson product moment. Dasar pengambilan keputusan uji ini sebagai berikut :

- a. Apabila Sig. $< 0,05$ maka H_0 ditolak (terdapat hubungan antara variable independen dengan variabel dependen)
- b. Apabila Sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima (tidak terdapat hubungan antara variable independen dengan variabel dependen)

6. Uji Regresi

Uji regresi adalah jenis uji yang digunakan untuk menentukan apakah suatu variabel dapat digunakan untuk memprediksi variabel lain atau tidak. Jika terdapat korelasi yang signifikan antara variabel dalam korelasi tersebut, analisis regresi dapat dilakukan. Selain itu, data harus memenuhi kriteria yang ditentukan untuk melakukan analisis regresi sistematis. Pertama-tama, data harus akurat, konsisten, dan memiliki distribusi normal atau linier. Pengambilan keputusan uji regresi ini, berdasarkan :

- a. Apabila t hitung $> t$ tabel atau nilai sig $< 0,05$, maka H_0 ditolak (variable independen berpengaruh terhadap variabel dependen)
- b. Apabila t hitung $< t$ tabel atau nilai sig $> 0,05$, maka H_0 diterima (variable independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen). menguji hubungan dua atau lebih variabel. Apakah variabel tersebut memiliki hubungan dan bagaimana arah hubungan tersebut. Uji yang dipakai yaitu korelasi pearson product moment.

Dasar pengambilan keputusan uji ini adalah :

- a. Apabila Sig. $< 0,05$ maka H_0 ditolak (terdapat hubungan antara variable independen dengan variabel dependen)
- b. Apabila Sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima (tidak terdapat hubungan antara variable independen dengan variabel dependen)

7. Uji Regresi

Uji regresi adalah jenis uji yang digunakan untuk menentukan apakah suatu variabel dapat digunakan untuk memprediksi variabel lain atau tidak. Jika terdapat korelasi yang signifikan antara variabel dalam korelasi tersebut, analisis regresi dapat dilakukan. Selain itu, data harus memenuhi kriteria yang ditentukan untuk melakukan analisis regresi sistematis. Pertama-tama, data harus akurat, konsisten, dan memiliki distribusi normal atau linier.

Pengambilan keputusan uji regresi ini, berdasarkan :

- a. Apabila t hitung $> t$ tabel atau nilai sig $< 0,05$, maka H_0 ditolak (variable independen berpengaruh terhadap variabel dependen),
- b. Apabila t hitung $< t$ tabel atau nilai sig $> 0,05$, maka H_0 diterima (variable independen tidak berpengaruh terhadap variabel depende

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

IV.1 Gambaran umum desa Bulu

Berdasarkan data Desa Bulu, jumlah penduduk saat ini 6.154 jiwa, terdiri dari 2 desa, 2 RW, dan 20 RT. Desa yang wilayah administrasinya terluas adalah Dusun 1 dengan luas 0,74 Km² (52%) dan yang tersempit adalah Dusun 2 dengan luas 0,69 Km² (48%). Berikut rinciannya :

Tabel 4.1

Gambaran umum Desa Bulu

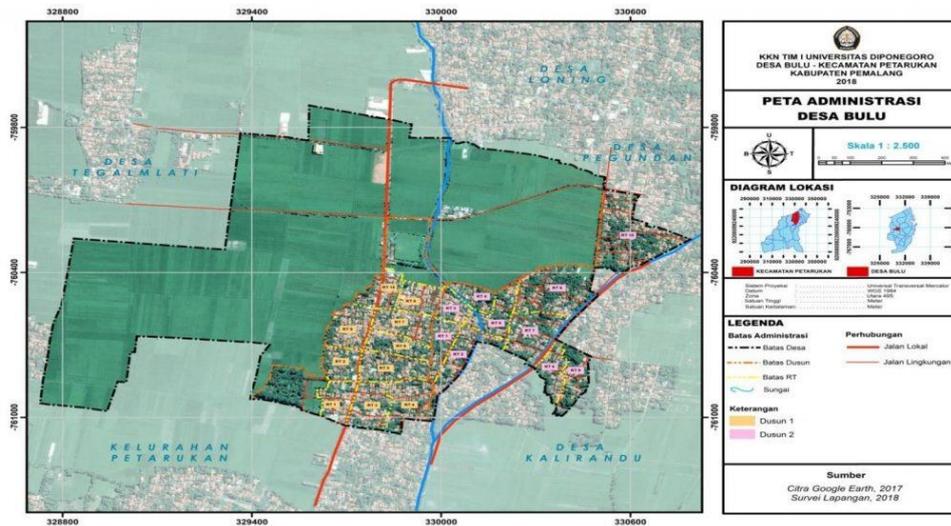
No.	Dusun	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)	RT	RW
1	1	0,74	52	1	10
2	2	0,69	48	1	10

Sumber : Data Demografi Desa Bulu

Batas-batas Desa Bulu meliputi :

- Sebelah Utara : Desa Pegundan/ desa Loning
- Sebelah Selatan : Kelurahan Petarukan
- Sebelah Timur : Desa Kalirandu
- Sebelah Barat : Desa Tegalmelati

Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Bulu



Sumber : Gambar Demografi Desa Bulu

IV.2 Gambaran Demografi

IV.2.1 Jumlah Penduduk

Data Monografi menyebutkan tahun 2021 jumlah penduduk desa Bulu sebanyak 6.154 jiwa. Tabel di bawah ini memberikan statistik tentang 3.034 laki-laki dan 3.120 perempuan :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk menurut kelompok Umur

Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4

0 - 4	364	219	583
5 - 9	272	311	583
10 - 14	259	342	601
15 - 19	231	309	540
20 - 24	296	259	555
25 - 29	276	221	497
30 - 39	482	520	1.002
40 - 49	333	356	689
50 - 59	317	342	659
60+	204	241	445
Jumlah	3.034	3.120	6.154

Sumber : Data monografi 2021

Tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan 6.154 jiwa, dengan terdiri dari laki-laki 3.034 jiwa, dan perempuan 3.120 jiwa.

IV.2.2 Penduduk Menurut Pendidikan

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden
Belum sekolah	1.382 jiwa
SD/Sederajat	3.180 jiwa
SMP/Sederajat	730 jiwa

SMA/Sederajat	475 jiwa
Perguruan Tinggi	112 jiwa
Putus Sekolah	75 jiwa
Buta Aksara	200 jiwa
Total	6.154

Sumber : Data Monografi 2021

Berdasarkan data demografi desa Bulu menurut pendidikan saat ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan diantaranya merupakan lulusan SMA/ sederajat berjumlah 475 orang. Sedangkan sisanya terdiri dari SD/ sederaja berjumlah 3.180 orang, SMP/ sederajat berjumlah 730 orang, S-1 sebanyak 112 orang, dan sisanya 1.382 belum sekolah, 75 putus sekolah, dan 200 jiwa buta aksara.

IV.2.2 Penduduk menurut mata pencaharian

Tabel 4.4
Penduduk Menurut Mata pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah Responden
Petani	600 jiwa
Pedagang	900 jiwa
PNS (Non Guru)	40 jiwa
Tukang Kayu/Batu	35 jiwa
Sopir/Angkutan	15 jiwa
Buruh	950 jiwa

Jasa/Persewaan	25 jiwa
Swasta	140 jiwa
Total	2.705

Sumber :Data Monografi 2021

Tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk dengan berdasarkan mata pencaharian yang terdiri dari petani, 600 jiwa, pedagang 900 jiwa, PNS 40 jiwa, Tukang kayu/batu 35 jiwa, sopir angkutan 15 jiwa buruh 950 jiwa, jasa/persewaan 25 jiwa, dan sisanya swasta 140 jiwa.

IV.2.4 Sarana dan Prasarana desa Bulu

Tabel 4.4

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Masjid	1 buah
Musholah	12 buah
Puskesmas	1 buah
Posyandu	4 buah
Lapangan Olahraga	1 buah
Seni suara/Hadroh	1 grup
Karawitan	1 grup
Jalan Desa	3 Km
Jalan Kabupaten	1,5 km

Sumber : Data Monografi 2021

Tabel di atas menunjukkan data Desa Bulu berdasarkan sarana dan prasarana yang meliputi 1 masjid, 12 mushola, 1 puskesmas, 4 posyandu, 1 lapangan olah raga, 1 kelompok seni vokal/hadroh. Karawitan Grup 1, jalan desa 3 km dan jalan Kabupaten 1,5 km.

IV.3 Visi dan Misi

IV.3.1 Visi

Visi masa depan yang proaktif, kreatif dan berkelanjutan adalah Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Salah satu alat peraga tersebut adalah kronologi ancaman yang disampaikan warga Kecamatan Bulu, Petarukan, Kabupaten Pemalang.

Dalam konteks ini dibentuk visi dan misi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Terletak di Kecamatan Petarukan, tepat di Desa Bulu, mempunyai tujuan yang ingin dicapai **“terwujudnya masyarakat desa Bulu yang makmur, aman, damai, dan mengerti aturan hukum“**

IV.3.2 Misi

Agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan mewujudkan visinya, misi harus diterjemahkan ke dalam tindakan. Tujuan dari pernyataan misi adalah untuk memberikan contoh yang jelas tentang apa yang dilakukan Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Tujuan Desa Bulu Kecamatan Petarukan yang terletak di sebelah selatan Desa Petarukan adalah :

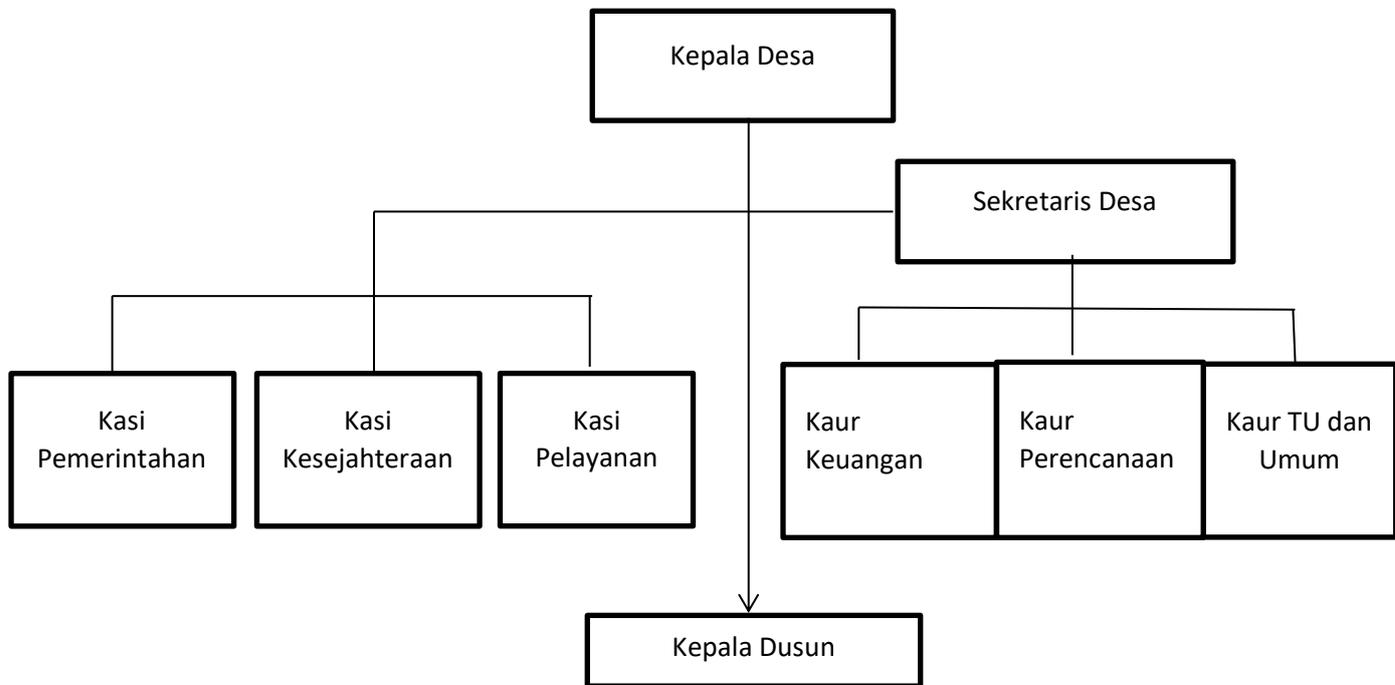
- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 2) Membangun negara yang aman, tertib, dan damai dalam lingkungan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia
- 3) Menciptakan lingkungan yang damai, toleran, persatuan dan kerukunan
- 4) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian religius dan religious

- 5) Peningkatan perekonomian nasional berkat kekuatan asing
- 6) Peningkatan prasarana, sarana dan prasarana dasar.

4.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bulu

A. Dasar Hukum dan Struktur Organisasi pemerintahan desa Bulu

Berikut peraturan yang menjadi landasan hal tersebut, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang atruktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa :



Sumber : Bagan Balai Desa Bulu

Merujuk pada peraturan di atas, maka susunan organisasi pemerintahan negara terdiri atas kepala negara dan dibantu oleh pejabat negara sebagai unsur penyelenggara negara. Perangkat desa kemudian diangkat oleh walikota desa setelah berkonsultasi dengan camat atas nama bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat negara bertanggung jawab kepada kepala negara.

4.3.1 Tugas dan Fungsi Perbekel

Perbekel menjabat sebagai kepala negara yang memimpin pemerintahan negara. Perbekel bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan kegiatan lain yang ditugaskan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

A). Mengatur pemerintahan negara, sebagai :

- a. Administrasi Pemerintahan;
- b. menetapkan peraturan di dalam negeri;
- c. nasihat mengenai masalah pertanahan;
- d. memajukan perdamaian dan ketertiban;
- e. memimpin upaya perlindungan masyarakat;
- f. administrasi kependudukan;
- g. penataan dan pengelolaan wilayah;
- h. penyusunan profil negara; Dan
- i. pencegahan dan penanggulangan bencana.

B). Melaksanakan pembangunan dalam negeri, seperti :

- a. pembangunan infrastruktur pedesaan;
- b. pengembangan bidang pendidikan; Dan
- c. pembangunan bidang kesehatan.

C). Pengembangan masyarakat, seperti :

- a. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat;
- c. Terlaksananya gotong royong dan bantuan masyarakat murni;
- d. Penerapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
- e. Orientasi dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat; Dan
Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan.

- f. Pemberdayaan masyarakat, seperti :
- g. Pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang kebudayaan dan kesenian;
- h. Usaha peningkatan ekonomi masyarakat;
- i. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik;
- j. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- k. Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; Dan
- l. Pengembangan peran organisasi di bidang kepemudaan, olah raga, dan organisasi kepemudaan.

B. Sekretaris Negara

Sekretaris Negara berfungsi sebagai unsur utama sekretariat negara. Bertanggung jawab membantu Perbekel dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perbekel.

Fungsi sekretaris Negara :

- a. Melakukan urusan administratif seperti pengelolaan naskah, administrasi persuratan, kearsipan dan transportasi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa beserta kantor, mempersiapkan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, serta pelayanan umum.
- c. Menjalankan fungsi keuangan seperti mengelola rekening bank, mengaudit rekening bank, memverifikasi rekening bank, dan mengawasi operasi gubernur, kantor gubernur, administrasi distrik, BPD, dan administrasi distrik lainnya serta pengelolaan rekening bank.

- d. Melakukan perencanaan seperti pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa), inventarisasi data pada lingkup konstruksi, melaksanakan monitoring dengan evaluasi program, penatausahaan serta penyediaan fasilitas pencabutan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), dan penolakan Perbekel laporan. .

B. Kepala Urusan

Kepala Bisnis, dengan tugas Sekretaris. Secara efektif mendukung separatis dalam melaksanakan tugas administratif yang diberikan oleh pemerintah dan tugas lain yang diberikan oleh pengawas perbatasan dan/atau negara. Fungsi manajer bisnis:

- a. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum mengurus urusan administrasi seperti inventarisasi, pelayanan, persiapan rapat, penyediaan prasarana dan kantor negara, administrasi persuratan, arsip dan pengiriman, serta tugas-tugas administrasi pejabat negara.
- b. Kepala urusan keuangan mempunyai fungsi antara lain: mengurus tata usaha keuangan, penatausahaan sumber pendapatan dan pengeluaran, pemeriksaan tata usaha keuangan dan penatausahaan pendapatan Perbekel, aparatur negara, BPD dan lembaga pemerintahan lainnya. negara, serta penatausahaan keuangan negara. tanggung jawab
- c. Pejabat Urusan Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut: Perencanaan perencanaan yang cermat, yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPB Desa), menginventarisasi data seperti dan bagian pengembangan program, pemantauan dan evaluasi, pengadministrasian dan fasilitasi pelaksanaan program. persiapan petani menengah. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), dan juga penyusunan laporan Perbekel.

C. Kepala Seksi

Kepala bagian berfungsi sebagai unsur pelaksana teknis. Bertanggung jawab membantu perbeker dalam pelaksanaan tugas operasional serta tugas lain yang dilimpahkan oleh perbeker.

Fungsi-fungsi Kepala Seksi :

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN :

1. Menjamin pengelolaan administrasi publik;
2. Menyiapkan rancangan peraturan negara;
3. Nasihat mengenai hal pertanahan;
4. Memajukan perdamaian serta ketertiban umum;
5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
6. Memajukan serta melaksanakan administrasi kependudukan beserta catatan sipil secara berkala;
7. Organisasi dan pengurus daerah;
8. Pengumpulan data, persiapan dan penggunaan profil negara;
9. Pelatihan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana.

TANGGUNG JAWAB BAGIAN KESEJAHTERAAN :

1. Tercapainya pembangunan infrastruktur pedesaan;
2. Pelatihan dan pengembangan di bidang pendidikan;
3. Orientasi dan pembangunan di bidang kesehatan;
4. Memantau, mensosialisasikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang seni dan budaya;
5. Pelatihan, sosialisasi dan penumbuhan partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi,

6. Melakukan pengawasan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang kebersihan, keindahan, pertamanan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
7. Kepemimpinan, sosialisasi dan penumbuhan partisipasi masyarakat dalam politik dan persatuan bangsa;
8. Pengembangan dan penguatan kesejahteraan keluarga;
9. Pengembangan organisasi di bidang kepemudaan, olah raga, dan organisasi kepemudaan.

SEKTOR JASA:

1. memberikan nasihat dan motivasi mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
2. melakukan upaya peningkatan kegiatan dukungan bersih, gotong royong, dan partisipasi masyarakat;
3. orientasi dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat;
4. orientasi dan pengembangan dalam pekerjaan;
5. inventarisasi dan pemeliharaan barang milik desa; Dan
6. menyelenggarakan pelayanan perizinan.
7. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pemerintahan yang baik, serta peningkatan partisipasi dan otonomi masyarakat dalam pembangunan

4.3.2 Fungsi dan struktur LPMD Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Keberlanjutan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMDILKMK), atau dengan manfaat yang berbeda dan berbeda untuk memulai dan melaksanakan proyek

pembangunan partisipatif, pelestarian otonomi masyarakat, gotong royong dan kepemimpinan . dan manajemen proyek konstruksi. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Menyambut dan menyalurkan aspirasi masyarakat berkembang,
2. Menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan NKRI,
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat,
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan penilaian hasil pembangunan secara partisipatif,
5. Menyambut dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pertumbuhan dan pembangunan serta merangsang prakarsa masyarakat, partisipasi dan otonomi, gotong royong dan
6. Penggalan, pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.

Adapun struktur organisasinya sebagai berikut :

1. Ketua : Surono
2. Wakil Ketua : Surono
3. Sekretaris : Impron rosadi
4. Bendahara : Cusmiharti
5. Seksi Agama : Sudinah
6. Seksi Pendidikan : Rehwanto
7. Seksi Pemuda : Sugiono
8. Seksi Pemuda : Kusnadi
9. Seksi Pembangunan : Wiyoso
10. Seksi Pembangunan : Riyanto
11. Seksi Kesehatan : Entin Ratini

4.3.3 Fungsi dasar, Tugas, dan Struktur Organisasi PKK desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Famiglia, juga dikenal sebagai PKK, adalah organisasi akar rumput yang bertujuan untuk mendukung perempuan. PKC terhadap berbagai bentuk dan kegiatan di berbagai daerah. Berikut 10 fungsi dasar BCP :

1. Evaluasi dan pengamalan Pancasila
2. Gotong royong
3. Makanan
4. Berdandan
5. Pengelolaan perumahan dan keluarga
6. Pendidikan dan keterampilan
7. Kesehatan
8. Perkembangan kehidupan koperasi
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan yang baik

Fungsi PKK:

1. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat harus siap dan mampu melaksanakan program TP PKK.
2. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pelatih dan pengawas TP PKK.

Fungsi PKK:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mendorong pelaksanaan program kerja TP PKK, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

2. Menghimpun, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk pelaksanaan program TP PKK.
3. Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/kelompok PKK yang bergantung padanya.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua musyawarah daerah TP PKK dan ketua umum/ketua TP PKK pada tingkat tertinggi.
4. Melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan (SMEP) pada pelaksanaan program TP PKK.

Struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

1. Presiden: Rukia
2. Wakil Presiden I : Entin Ratini
3. Wakil Presiden II : Rumonowati
4. Sekretaris : Kosmiharti
5. Wakil Sekretaris : Azizah
6. Bendahara : Turipah
7. Wakil Bendahara : Wasriyah

4.3. Tujuan dan Fungsi Karang Taruna Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang

Karang Taruna adalah organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda, di desa/kelurahan dan bergerak dalam bidang kesejahteraan. Berikut tujuan Karang Taruna :

1. Menjamin tumbuh dan berkembangnya tiap anggota masyarakat yang berkualitas, kalem, cerdas, inovatif, berkarakter serta menunjukkan kepekaan dan kepekaan

sosial dalam menyikapi berbagai persoalan sosial khususnya yang menyangkut generasi muda.

2. Setiap anggota masyarakat, khususnya generasi muda, wajib berperilaku di desa/lingkungan dengan sopan, hormat, bermartabat, dan gotong royong.
3. Meningkatkan sumber daya manusia khususnya generasi muda.
3. Pengembangan komersial menuju kemandirian setiap anggota masyarakat khususnya generasi muda.
4. Mengembangkan kemitraan yang menjamin pertumbuhan keterampilan dan potensi generasi baru yang ditargetkan dan berkelanjutan.

Karang Taruna mempunyai fungsi yang sangat berbeda-beda, salah satunya adalah mengembangkan potensi generasi muda di lingkungannya. Selain itu, fungsi organisasi pemuda antara lain :

1. Penyelenggara berbagai kegiatan dan perusahaan yang berkaitan dengan bantuan sosial.
2. Penyelenggara berbagai jenis pelatihan dan pendidikan di lingkungan setempat.
3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat yang lebih fokus pada generasi muda secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.
4. Penyelenggara berbagai kursus pelatihan dan pengembangan bagi generasi baru di bidang kewirausahaan
5. Meningkatkan pengetahuan generasi muda agar selalu aktif, kreatif dan inovatif.
6. Menumbuhkan semangat kekeluargaan, persatuan, solidaritas dan persahabatan dalam masyarakat.

7. Sebagai tempat pendampingan, rujukan dan dukungan sosial bagi anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan bantuan sosial.
8. Penyelenggaraan upaya pencegahan permasalahan sosial yang nyata.
8. Memperkuat sistem komunikasi di masyarakat.

